

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan Sumber Daya Manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas PPPA yakni : 1). Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2). Melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) adalah : 1). Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2). Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak adalah : 1). Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang

anak; 2). Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015 perlu dilaporkan sebagai salah satu bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah guna perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya. Untuk itulah dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

1.2. Dasar Hukum

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat (unit kerja yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah/*stakeholders* yang berkepentingan).
2. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan organisasi dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi, dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.
3. Memberikan masukan untuk perbaikan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Sedangkan manfaat LAKIP adalah :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).
2. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 065/58/VI tanggal 13 Januari 2016 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Surat Edaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/150/INPT tanggal 09 Februari 2016 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ditetapkan secara struktural Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membawahkan :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Perempuan;
 - b. Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan;
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak;
5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan;
 - b. Sub Bidang Keluarga Berencana;

Adapun tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
5. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :



1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 didukung sebanyak 42 PNS.

Tabel 1.1
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pemberdayaan
Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Doktoral/ S3	-	1	1
2	Pasca Sarjana/ S2	4	5	9
3	Sarjana / S1	4	14	18
4	Diploma-IV	-	1	1
5	Diploma-III	-	4	4
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	1	8	9
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	Jumlah	9	33	42

Tabel. 1.2.
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan Badan Pemberdayaan
Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II A	-	-	-
2.	II B	-	4	4
3.	II C	1	1	2
4.	II D	-	3	3
5.	III A	4	-	4
6.	III B	4	5	9
7.	III C	2	1	3
8.	III D	1	10	11
9.	IV A	-	3	3
10.	IV B	-	2	2
11.	IV C	-	-	-
12.	IV D	-	1	1
	Jumlah	12	30	42

Tabel. 1.3.
Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselonring Badan Pemberdayaan
Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	-	5	5
3.	Eselon IV	-	11	11
4.	Non Eselon	9	16	25
	Jumlah	9	33	42

Tabel. 1.4.
Keadaan Sarana dan Prasarana Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga
Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pembelian	Jumlah
1	2	3	4
1	Mini Bus	2008	2
2	Sepeda Motor	2008	6
3	Mesin Tik Manual	2008	3
4	Mesin Fotocopy	2008	1
5	Almari Arsip besi	2008	7
6	Filling Kabinet	2008	15
7	Brankas	2008	1
8	Penghancur Kertas	2008	2
9	Plang Nama Badan	2008	2
10	Plang nama P2TP2	2008	2
11	White Board	2008	3
12	Mesin Sidik Jari	2008	1
13	Proyektor	2008	2
14	Rak TV	2008	2
15	Meja Kerja	2008	8
16	Tempat tidur	2008	5
17	Meja Komputer	2008	10
18	Ambal	2008	1
19	Kursi Sofa	2008	1
20	vacum cleaner	2008	1

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pembelian	Jumlah
1	2	3	4
21	Kulkas	2008	1
22	Kipas Angin	2008	4
23	Tabung gas	2008	2
24	Kompor Gas	2008	1
25	Televisi	2008	2
26	Wireless	2008	2
27	Kamera	2008	2
28	Dispenseer	2008	3
29	Lambang Garuda	2008	2
30	Handycamp	2008	2
31	Komputer Desktop	2008	8
32	Personal Komputer	2008	3
33	Komputer Notebook	2008	2
34	UPS	2008	9
35	Printer Dot Matrik	2008	1
36	Printer Laser Jet	2008	8
37	Printer	2008	3
38	Scanner	2008	2
39	Meja Kerja Esellon 2	2008	1
40	Meja Kerja Esellon 3	2008	5
41	Meja Kerja Esellon 4	2008	11
42	Kursi Komputer	2008	10
43	Meja Rapat Panjang	2008	1
44	Kursi Kerja Esellon 2	2008	1
45	Kursi Kerja Esellon 3	2008	5
46	Kursi Kerja Esellon 4	2008	11
47	Kursi Kerja Staf	2008	25
48	Kursi Rapat	2008	20
49	Lemari Kaca	2008	3
50	Baleho	2008	1
51	Meja Kerja 1/2 biro	2008	25
52	Kursi Kerja	2008	10
53	Pesawat Telepon	2008	2
54	Faximilie	2008	1
55	Tugu PKK	2008	4
56	Magic Com	2009	1
57	Jam Dinding/Meja	2009	5
58	Komputer	2011	1
59	Router	2011	1
60	Antena Router	2011	2

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pembelian	Jumlah
1	2	3	4
61	Almari Arsip besi	2013	2
62	Filling Kabinet	2013	6
63	White Board	2013	2
64	Meja Kerja	2013	6
65	Kursi Kerja	2013	7
66	Kursi Lipat	2013	10
67	Meja Komputer	2013	2
68	Kamera	2013	1
69	Komputer PC	2013	2
70	Komputer Notebook	2013	4
71	Printer	2013	2
72	Printer	2013	5
73	UPS	2013	2
74	USB Flasdisk 4 GB	2013	8
75	USB Flasdisk 8 GB	2013	10
76	External Hardisk	2013	2
77	Mouse	2013	10
78	Keyboard	2013	10
79	Network Swith	2013	1
80	Network Cable	2013	1
81	Hardware WIFI	2013	1
82	Mesin Ketik Elektronik	2014	1
83	Lemari Besi 2 Pintu	2014	4
84	Filling Kabinet 4 laci	2014	5
85	White Board	2014	2
86	Komputer PC	2014	2
87	Komputer Notebook	2014	5
88	Printer Laser Jet	2014	4
89	Printer Ink Jet	2014	6
90	UPS	2014	2
91	USB Flasdisk 4 GB	2014	10
92	USB Flasdisk 8 GB	2014	10
93	Harddisk External	2014	5
94	Mouse	2014	10
95	Keyboard	2014	10
96	Network Switch	2014	2
97	Network Cable	2014	1
98	Modem	2014	2
99	Wireless Access Point	2014	1
100	Meja Kerja	2014	7

No	Sarana dan Prasarana	Tahun Pembelian	Jumlah
1	2	3	4
101	Meja Kerja Kepala Badan	2014	1
102	Kursi Kerja	2014	7
103	Kursi Kerja Kepala Badan	2014	1
104	Kursi Lipat	2014	10
105	Meja Komputer	2014	2
106	Handycam	2014	1
107	Mesin Foto Copy	2015	1
108	Mesin Penghancur Kertas	2015	2
109	Papan DUK	2015	1
110	Lemari Besi 2 Pintu	2015	2
111	Rak Arsip	2015	6
112	Komputer Notebook	2015	2
113	Printer Dot Matrik	2015	1
114	Printer Multifungsi	2015	2
115	Scanner	2015	2
105	Network Switch	2015	2
106	Modem	2015	2
107	Wireless Access Point	2015	5
108	Kursi Lipat	2015	10
109	Kursi Tunggu	2015	2
110	Kompor Gas	2015	1
111	Kulkas	2015	1
112	Dispenser	2015	6
113	Infocus dan Layar	2015	1
114	Faximilie	2015	1

1.3.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

1.3.3 Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi SKPD

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

2.3 Rencana Kinerja SKPD

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahunan